



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

LAPORAN HASIL ANALISIS

Efisiensi Anggaran Berbasis
Collaborative dan Crosscutting Program

Balai Bahasa Provinsi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

A. Latar Belakang

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (atau lebih dikenal dengan sebutan Badan Bahasa atau BPP Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berubah dan berkembang sesuai dengan tantangan dan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Pemahaman yang utuh terhadap adanya perubahan di dalam masyarakat akan sangat menentukan arah pengembangan BPP Bahasa sehingga lembaga ini dapat terus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan masyarakat.

Mulai tahun 2021 kebijakan penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran di lingkungan BPP Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) balai dan kantor bahasa di tiga puluh provinsi mengalami perubahan. Hal itu

sejalan dengan perubahan prioritas pembangunan nasional di satu sisi dan upaya penyegaran visi dan misi di lingkungan BPP Bahasa di sisi lainnya. Perubahan seperti ini merupakan sebuah keniscayaan karena munculnya harapan-harapan baru untuk semakin mengukuhkan keberadaan BPP Bahasa sebagai lembaga otoritatif di dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta penginternasionalan bahasa Indonesia yang aktivitasnya dilandasi oleh prinsip-prinsip ilmiah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (atau lebih dikenal dengan sebutan Badan Bahasa atau BPP Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berubah dan berkembang sesuai dengan tantangan dan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya adalah Program Merdeka Belajar Episode 17 ;Revitalisasi Bahasa Daerah yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi.

Pada 30 Tahun terakhir terdapat sekitar 718 Bahasa daerah namun kondisinya punah dan kritis. Penyebab Bahasa Daerah punah adalah penutur sejatinya yang tidak lagi menggunakan dan mewariskan penggunaan bahasanya kepada generasi berikutnya. Untuk itu diluncurkan Revitalisasi Bahasa Daerah yang berbasis sekolah dan komunitas tutur untuk merespon kondisi kritis Bahasa daerah.

Adapun dasar hukum Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah selaku salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Bahasa juga memperoleh alokasi anggaran BA BUN Tahun 2022 ini melaksanakan Revitalisasi Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) bersama sama dengan pemerintah Daerah Kab/kota. *collaborative* dan *crosscutting* program ini adalah berbagi peran yang jelas sehingga program atau kegiatan tidak tumpang tindih, yang mendukung kepada efisiensi penggunaan anggaran Negara

B. Collaborative dan Crosscutting Program

Revitalisasi bahasa daerah secara umum diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beragam sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut pada taraf aman dan ditransmisikan dengan baik. Revitalisasi Bahasa Daerah yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), merupakan salah satu dari program perlindungan bahasa daerah yang bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah

kehidupan sehari-hari dan meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah. Revitalisasi Bahasa Daerah dapat dilaksanakan dengan berbasis sekolah, komunitas, dan keluarga. Di Provinsi Jawa Tengah Revitalisasi Bahasa Daerah berbasis Sekolah masuk pada Model A.

Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang dibawah KKLP Pelindungan dan Pemodernan yang focus sarannya adalah partisipan pelindungan Bahasa yang ditarget capaian outputnya adalah sebanyak 251 orang untuk tahun anggaran 2022 ini. Sebenarnya sesuai dengan Pelindungan Bahasa daerah adalah menjadi tugas pokok pemerintah daerah, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang merupakan UPT nya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi yang ada di daerah hanya mempunyai tugas memfasilitasi usaha revitalisasi Bahasa daerah tersebut melalui *collaborative* Program ini.

Melalui *collaborative* dan *crosscutting* program ini, peran Balai Bahasa Provinsi Bahasa Jawa Tengah dengan pemerintah daerah jelas. Berikut ini salah satu contoh pembagian peran dalam Program Kolaboratif dalam rangka Pelindungan Bahasa.

No	Tahapan Kegiatan	Anggaran	
		APBN	APBD
1	Koordinasi	√	
2	Pelatihan Guru Master/Utama	√	
3	Pelatihan Guru MGMP/KKG		√
4	Pelaksanaan Pemelajaran di Kelas		√
5	Pemantauan	√	
6	FTBI tingkat Kabupaten/Kota		√
7	FTBI tingkat Provinsi	√	√
8	Peliputan	√	

Dari Rangkaian kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah di Jawa Tengah sudah terlaksana tahap koordinasi pakar dan koordinasi Pemerintah Daerah. Pada Kegiatan rakor berlangsung di Hotel Patra Jasa Semarang tgl 23-26 Juni 2022. Pada Rakor tersebut dihadiri oleh 16 pakar, 35 Kepala Dinas Kab/kota di Jawa Tengah. Dari rakor tersebut dihasilkan beberapa Rumusan dan Rekomendasi sebagai Berikut :

Rumusan :

1. Revitalisasi Bahasa Daerah perlu dilakukan karena terjadi penurunan sikap positif terhadap Bahasa Jawa khususnya pada generasi muda di Jawa Tengah.
2. Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah yang berdikari, berjenjang dan berkelanjutan belum dilakukan oleh pemerintah Kab/kota di Jawa Tengah
3. Kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah harus menghasilkan dokumen sebagai dasar dalam pengusulan anggaran;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Tengah mendukung Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)

Rekomendasi :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan dukungan pada Pelaksanaan program Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah di Jawa Tengah
2. Koordinasi antara Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah perlu diwujudkan untuk mendukung Program Revitalisasi Bahasa Daerah
3. Pelaksanaan Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dilakukan pada awal tahun anggaran.

C. Analisis

Dari rumusan dan rekomendasi diatas dapat dianalisis bahwa sebenarnya Tugas perlindungan Bahasa daerah adalah tugas pokok pemerintah daerah setempat . Akan tetapi Perlu di fasilitasi dan didukung oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga yang tugasnya mengembangkan, membina Bahasa baik itu Bahasa Daerah maupun Bahasa Indonesia. Supaya Bahasa Tersebut tidak punah. Untuk itu adanya pembagian peran antara Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan pemda di 35 kab/kota di Jawa Tengah dalam kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah dalam upaya perlindungan Bahasa daerah sebagai berikut :

1. Tahapan yang Dibiayai oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.811.465.000 adalah tahapan koordinasi (Sepenuhnya ditanggung Balai),Pelatihan Guru Master/utama, Pemantauan, Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi dan Peliputan;
2. Tahapan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di 35 Kab/kota di Jawa Tengah sebesar Rp97.556.350.000 meliputi Pelatihan Guru MGMP/KKG, Pelaksanaan Pemelajaran di Kelas, FTBI tingkat Kabupaten/Kota, FTBI tingkat Provinsi.

D. Simpulan

Collaborative dan *crosscutting* program yang dilakukan di Balai Bahasa Provinsi Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /kota se-Jawa Tengah lewat Revitalisasi Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) telah berdampak positif pada Generasi muda di Jawa Tengah yang semakin tidak bisa berbahasa Jawa di kehidupan sehari harinya. Baik dilingkungan Sekolah maupun di lingkungan Keluarga

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ganjar Harimansyah
NIP 19750522200112003

Dokumentasi

